

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.427598/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 08 Januari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
- 4. Kode/Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
- Sebesar : Rp. 11.879.526.000 (SEBELAS MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.658.076.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	221.450.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 11.879.526.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

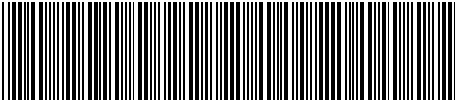
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025

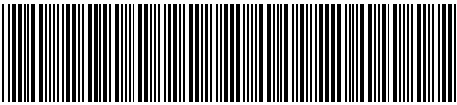


DS:6705-0701-3627-3650

Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	553.000.000
EC.3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp.	375.000.000
EC.7010	Manajemen Mutu	Rp.	178.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.326.526.000
WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Rp.	11.326.526.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
I A. INFORMASI KINERJA

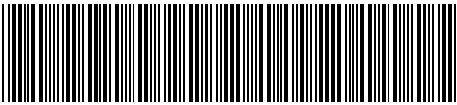


DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Program	:	032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			553.000.000
Kegiatan	:	3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			375.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,00	Produk, Laporan, Keputusan10.000.000
Rincian Output	:	01	BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	1.00	Produk10.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3989.PDC	Sertifikasi Produk	345,00	produk, Sertifikat210.000.000
Rincian Output	:	01	PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (PN)	345.00	produk210.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3989.PDF	Sertifikasi Lembaga	14,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat105.000.000
Rincian Output	:	01	PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (PN)	14.00	Lembaga105.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	5,00	Produk, Laporan, Keputusan25.000.000
Rincian Output	:	01	QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (PN)	5.00	Produk25.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan25.000.000
Rincian Output	:	01	QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PN)	20.00	Lembaga25.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
I A. INFORMASI KINERJA



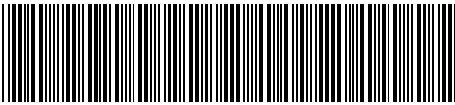
DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	7010	Manajemen Mutu				178.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.000.000
Rincian Output	:	01	ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Orang, Kegiatan	6.500.000
Rincian Output	:	01	DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.00	Kegiatan	6.500.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	85.000.000
Rincian Output	:	01	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	(PN)	1.00 Rekomendasi Kebijakan	85.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7010.PDD	Standarisasi Lembaga	2,00	Lembaga, Unit Kerja	70.000.000
Rincian Output	:	01	PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	(PN)	1.00 Lembaga	25.000.000
		02	PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	(PN)	1.00 Lembaga	45.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,00	Produk, Laporan, Keputusan	6.500.000
Rincian Output	:	01	QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	(PN)	1.00 Produk	6.500.000
Program	:	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen				11.326.526.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6705-0701-3627-3650

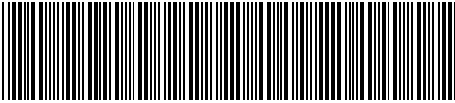
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Kegiatan	:	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan					11.326.526.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.245.401.000
Rincian Output		:	01	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	111.125.000
		:	02	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	11.134.276.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			2,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	81.125.000
Rincian Output		:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.00	Dokumen	57.675.000
		:	02	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Dokumen	23.450.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6705-0701-3627-3650

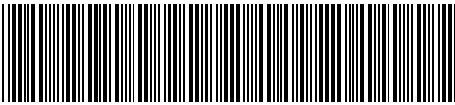
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	11.879.526.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	11.658.076.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	221.450.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



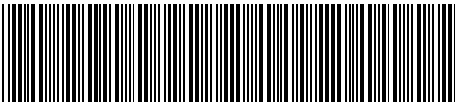
DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	6.983.259	4.896.267	-	-	-	11.879.526	19 . 51	
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	553.000	-	-	-	553.000		
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	-	375.000	-	-	-	375.000		
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	10.000	-	-	-	10.000		
04	PNBP	-	10.000	-	-	-	10.000		
3989.PDC	Sertifikasi Produk (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	210.000	-	-	-	210.000		
01	RM	-	180.000	-	-	-	180.000		
04	PNBP	-	30.000	-	-	-	30.000		
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	105.000	-	-	-	105.000		
01	RM	-	45.000	-	-	-	45.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



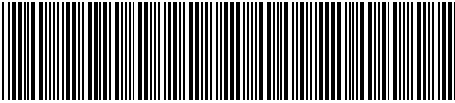
DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	60.000	-	-	-	60.000	136@	
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	25.000	-	-	-	25.000	19 . 51	
04 PNB		-	25.000	-	-	-	25.000	136@	
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	25.000	-	-	-	25.000	19 . 51	
04 PNB		-	25.000	-	-	-	25.000	136@	
7010	Manajemen Mutu	-	178.000	-	-	-	178.000		
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	10.000	-	-	-	10.000	19 . 51	
04 PNB		-	10.000	-	-	-	10.000	136@	
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	6.500	-	-	-	6.500	19 . 51	
04 PNB		-	6.500	-	-	-	6.500	136@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	-	85.000	-	-	-	85.000	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
01	RM	-	85.000	-	-	-	85.000	136	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga	-	70.000	-	-	-	70.000	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
01	RM	-	45.000	-	-	-	45.000	136	
04	PNBP	-	25.000	-	-	-	25.000	136@	
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	-	6.500	-	-	-	6.500	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
04	PNBP	-	6.500	-	-	-	6.500	136@	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	6.983.259	4.343.267	-	-	-	11.326.526		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	6.983.259	4.343.267	-	-	-	11.326.526		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



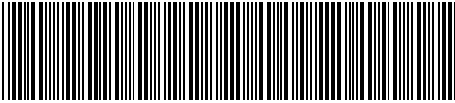
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	6.983.259	4.262.142	-	-	-	11.245.401	19 . 51	
01 RM		6.983.259	4.262.142	-	-	-	11.245.401	136	
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	81.125	-	-	-	81.125	19 . 51	
01 RM		-	57.675	-	-	-	57.675	136	
04 PNB		-	23.450	-	-	-	23.450	136@	
JUMLAH		6.983.259	4.896.267	-	-	-	11.879.526		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

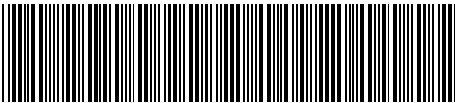
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	598.687	994.376	1.041.779	1.010.021	989.622	1.292.567	1.015.068	966.971	1.033.240	1.007.099	980.172	949.923	11.879.526
		BELANJA PEGAWAI	250.938	581.938	612.938	581.938	581.938	881.938	581.938	581.938	581.938	581.938	581.938	581.941	6.983.259
		BELANJA BARANG	347.749	412.438	428.841	428.083	407.684	410.629	433.130	385.033	451.302	425.161	398.234	367.982	4.896.267
		Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.840	32.282	37.708	34.333	27.844	43.538	36.299	29.167	46.358	37.412	43.255	4.964	375.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.840	32.282	37.708	34.333	27.844	43.538	36.299	29.167	46.358	37.412	43.255	4.964	375.000
		Manajemen Mutu	0	15.500	18.500	33.940	1.500	17.000	17.000	4.804	26.109	24.707	1.940	17.000	178.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	15.500	18.500	33.940	1.500	17.000	17.000	4.804	26.109	24.707	1.940	17.000	178.000
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	596.847	946.594	985.571	941.748	960.278	1.232.029	961.769	933.000	960.773	944.980	934.977	927.959	11.326.526
		51 BELANJA PEGAWAI	250.938	581.938	612.938	581.938	581.938	881.938	581.938	581.938	581.938	581.938	581.938	581.941	6.983.259
52 BELANJA BARANG DAN JASA	345.909	364.656	372.633	359.810	378.340	350.091	379.831	351.062	378.835	363.042	353.039	346.018	4.343.267		
032.13.EC.3989	032.13.EC.7010	PERKIRAAN PENERIMAAN	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.708	3.452.430
		- PNPB (425289)	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.702	287.708	3.452.430

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
IV A. B L O K I R

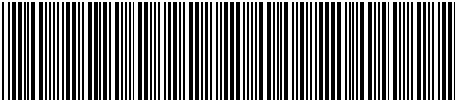


DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [427598] BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	3989.PDF	Sertifikasi Lembaga
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 221.450	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	52 Belanja Barang Rp. 221.450		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.540
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.560
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 580		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.900
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.420		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.720
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
3989.PDC	Sertifikasi Produk	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.240		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.600
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.760		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.680
			Arahan Presiden dalam sidang kabinet

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
IV A. B L O K I R



DS:6705-0701-3627-3650

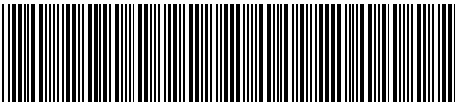
Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [427598] BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3989.QIC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7010.PDD	Standarisasi Lembaga
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 412		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	7010.QIA	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Pengawasan dan Pengendalian Produk
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.588		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.500
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	032.13.WA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7010	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Program Dukungan Manajemen
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Manajemen Mutu		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.850
	7010.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	7010.DCC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 540		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
7010	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	7010.DCC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.460		Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.500
	7010.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	7010.DCC	Arahan Presiden dalam sidang kabinet
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.500		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6705-0701-3627-3650

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [427598] BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001